

Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur dengan Pendekatan Pembangunan Manusia

Oleh :

Indah Purnama Sari¹⁾, Andi Harun Al Rasyid²⁾, Senen³⁾

^{1,2,3)} Mahasiswa Program S3 Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta

Email : indahps.unindra@gmail.com¹⁾, widyastuti_trimega@yahoo.com²⁾,

abdisantosasen@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the human development index on poverty in East Java. The study uses quantitative methods, with simple linear regression analysis using panel data of 266 samples, taken from 38 districts / cities in East Java with a total sample of 7 years (from 2011 to 2017). The data used in this study are secondary data from the Central Statistics Bureau of East Java. As an independent variable in this study is the Human Development Index and the dependent variable is poverty. The results showed that based on statistical tests the Human Development Index proved to significantly influence poverty at a significance level of 5%. The higher the Human Development Index, the poverty rate decreases. The ability of the HDI variable in explaining the poverty variable based on adjusted square reached 0,98%, indicating that the effort to alleviate poverty using the Human Development Index approach is a strategic enough step to be carried out by the East Java regional government.

Keyword: *Human Development Index, Poverty*

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan manusia yang digagas oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) telah diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, karena dinilai lebih relevan dibandingkan konsep pembangunan konvensional. Indonesia pertama kali mengaplikasikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1996 dan telah

digunakan dalam berbagai perencanaan pembangunan. IPM memiliki beberapa manfaat, diantaranya menjadi salah satu indikator mengukur keberhasilan dalam upaya membangun mutu hidup masyarakat, serta untuk membuat peringkat atau level pembangunan suatu negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis, karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, juga sebagai salah satu

alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada Tabel 1 ditunjukkan perbandingan IPM Indonesia dengan negara-negara ASEAN.

Tabel 1. Tren IPM Negara-negara ASEAN pada Tahun 2013 dan 2018

No	Negara ASEAN	2013			2018		
		Peringkat at ASEAN	Peringkat Dunia	IPM	Peringkat at ASEAN	Peringkat at Dunia	IPM
1	Indonesia	5	108	0,684	6	116	0,699
2	Malaysia	3	62	0,773	3	57	0,802
3	Filipina	6	117	0,660	5	113	0,699
4	Singapura	1	9	0,901	1	9	0,932
5	Thailand	4	89	0,772	4	83	0,755
6	Brunei Darussalam	2	30	0,852	2	39	0,853
7	Vietnam	7	121	0,638	7	116	0,694
8	Laos	8	139	0,569	8	139	0,601
9	Myanmar	10	150	0,524	10	148	0,578
10	Kamboja	9	139	0,584	9	146	0,582

Sumber : Human Development Index (UNDP, 2018)

Dari data tersebut tampak bahwa di wilayah regional ASEAN terjadi kesenjangan dalam pembangunan manusia, dengan IPM tertinggi mencapai 0,932 (kategori sangat tinggi, Singapura) dan IPM terendah 0,578 (kategori rendah, Myanmar). Di sisi lain, pada saat Negara

ASEAN mengalami kemajuan yang pesat dalam pembangunan manusia, Indonesia justru turun peringkat, baik di ASEAN maupun di dunia.

Pada Gambar 1 disajikan data perkembangan IPM Indonesia tahun 2014-2018.



Gambar 1. Data IPM Indonesia pada tahun 2014-2018
 (Sumber : BPS Provinsi Jatim, 2019)

Berdasar berita resmi dari BPS, pada tingkat regional, perkembangan pembangunan manusia Indonesia secara umum menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Seluruh provinsi menunjukkan kenaikan IPM selama periode 2010 hingga 2014 (BPS, 2015). Untuk data tahun 2018, Provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta (80,47), kedua adalah DI Yogyakarta (79,53), dan ketiga adalah Kalimantan Timur (75,83). Adapun provinsi dengan IPM terendah adalah Papua (60,06) namun Papua mengalami peningkatan dalam kategori IPM, di mana IPM Papua sudah masuk dalam kategori “Sedang” karena sudah berada di atas angka 60. Hal ini menunjukkan berbagai upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan utamanya di wilayah Papua menunjukkan hasil. Namun di sisi lain angka IPM yang terpaut jauh antara DKI Jakarta dan Papua menunjukkan kesenjangan pembangunan dan kesenjangan dalam kesejahteraan di berbagai wilayah di Indonesia masih menjadi masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Kajian tentang IPM erat kaitannya dengan aspek kemiskinan, karena tujuan pembangunan manusia hakikatnya adalah membebaskan manusia dari kemiskinan menuju kesejahteraan hidup. Pembangunan manusia dapat

memengaruhi angka kemiskinan, sebagaimana hasil penelitian (Amalia, Nurpita dan Oktavia, 2018; Nurmainah, 2013; Kotambunan, Palar dan Tumilaar, 2016; Susanti, 2013 dan Suliswanto, 2010) bahwa IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu penelitian ini mengkaji hubungan kausal antara IPM dengan kemiskinan.

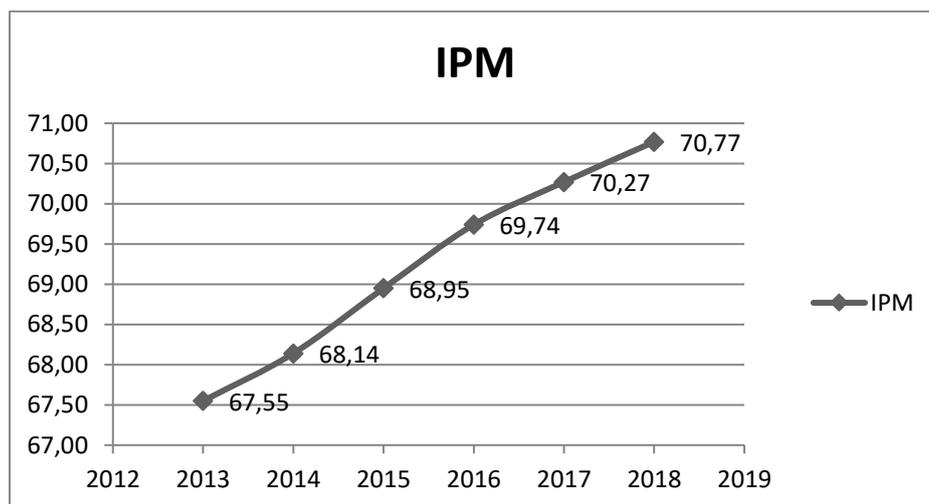
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa yang menarik untuk diteliti. Secara umum, wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Jatim daratan, dan Pulau Madura. Luas Jatim daratan mencapai 90 persen dari luas total Provinsi Jatim dan Pulau Madura hanya 10 persen. Dengan luas wilayah 47.799,75 km², Provinsi Jatim terbagi menjadi 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, dan 8.501 desa/kelurahan.

Berdasarkan data BPS, IPM Jawa Timur mengalami kenaikan dari tahun ke tahun serta mengalami kenaikan yang cukup baik untuk peringkat IPM menurut Provinsi., sebagaimana Gambar 2. Jatim Pada tahun 2010-2011 menempati peringkat 19, mulai tahun 2012 hingga 2014 naik peringkat menjadi peringkat ke 18, dan sejak tahun 2017 hingga tahun 2018 naik signifikan menjadi peringkat 15 dari 34 provinsi di Indonesia (BPS, 2019). Kendati grafik IPM menunjukkan tren

kenaikan, namun yang lebih penting adalah melihat tren pertumbuhannya, di mana pertumbuhan IPM fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2014 pertumbuhannya 1,07, menurun menjadi 1,03 pada tahun 2015, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2016 menjadi 1,21. Kondisi ini tidak bertahan lama karena pertumbuhan IPM Jatim menurun signifikan pada tahun 2017 menjadi 0,87 dan menurun kembali menjadi 0,71 pada tahun 2018.

Angka IPM tahun 2018 tertinggi pada kota Surabaya 81,74 dan IPM terendah di Kabupaten Sampang 61,00. IPM di Jatim menunjukkan ketimpangan, karena terpaut selisih yang sangat jauh, yaitu 20,74.

Dengan demikian tren pertumbuhan IPM yang semakin menurun serta tampak timpang sebagaimana terjadi di Jatim, mengindikasikan ada permasalahan dalam upaya pembangunan manusia.

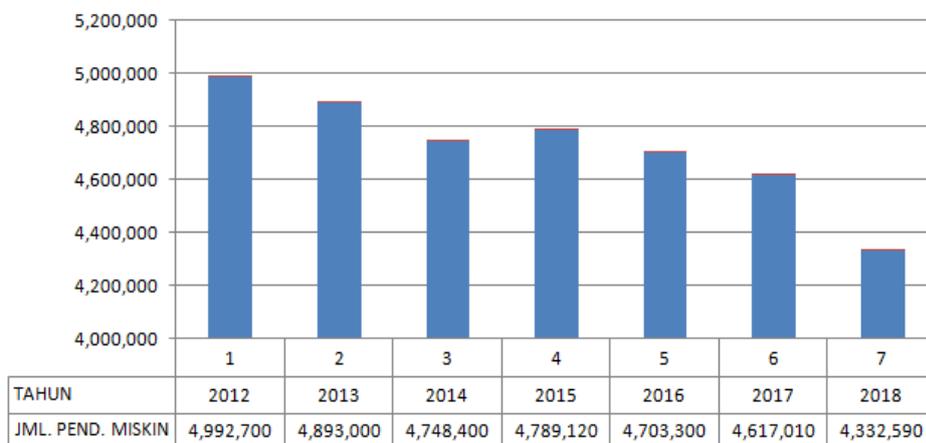


Gambar 2. IPM Jatim 2010 – 2018
(Sumber: BPS Provinsi Jatim, 2019)

Berdasarkan berita resmi statistik mengenai Profil Kemiskinan di Indonesia September 2018, bahwa secara umum pada periode 2003 hingga September 2018, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian terjadi pada tahun 2006, September 2013,

dan Maret 2015. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BPS, 2018: 2). Data penduduk miskin di Jatim menunjukkan bahwa dalam kurun waktu enam tahun jumlah penduduk miskin di

Jatim menurun 13,22 persen, sebagaimana pada Gambar 3.



Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jatim 2012 – 2018 (BPS, 2018)

Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2018 mencapai 11 persen dari populasi penduduk Jatim. Angka 4,3 juta jiwa ini tidak dapat diabaikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jatim karena fakir miskin adalah amanah Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 34. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal kemiskinan, negara harus hadir untuk memberikan solusi terarah, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana termaktub dalam UU Republik Indonesia (RI) Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 ayat 2.

Sebenarnya, secara pertumbuhan ekonomi, Jatim tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Wibisono dan Kuncoro (2015 yang dikutip oleh Kuncoro, 2019: 257) yang memerlihatkan dari tahun 2001 hingga 2013, terdapat tiga provinsi penyumbang PDB nasional

terbesar, yaitu DKI Jakarta, Jatim, dan Jawa Barat (Jabar). Posisi ini stagnan, dimana Jatim selalu diperingkat dua, yang berubah adalah persentase kontribusinya, dimana Jatim dan Jabar mengalami tren penurunan, sedangkan DKI Jakarta cenderung naik. Kestabilan tersebut merupakan indikasi tidak adanya gejolak ekonomi yang signifikan.

Data kemiskinan yang dioperasionalisasikan sebagai persentase penduduk miskin, sempat naik, namun kemudian mengalami tren penurunan. Persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2018 adalah Kabupaten Sampang sebanyak 21,21 persen dan yang terendah adalah Kota Batu 3,89 persen. Jumlah penduduk miskin terbanyak tahun 2018 adalah Kabupaten Malang 268.490 jiwa dan terendah di Kota Mojokerto 7.040 jiwa. Berdasarkan data kemiskinan,

tampak disparitas yang tinggi, karena selisihnya mencapai angka 261 ribu jiwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mengkaji fokus permasalahan bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Jatim?.

BAHAN DAN METODE

Kemiskinan

Masalah inti dari kemiskinan adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri, dan hingga saat ini menjadi problem utama bagi semua Negara. Di dalam UU No 13 tahun 2011 disebutkan tentang istilah “fakir miskin”. Fakir miskin menurut UU adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.

Amartya Sen, pemenang Nobel bidang ekonomi pada tahun 1998 mengemukakan bahwa kemiskinan tidak dapat diukur dengan baik hanya berdasarkan pendapatan atau bahkan dengan utilitas, karena yang paling penting

bukanlah apa yang dimiliki seseorang atau perasaan yang timbul dari kepemilikan itu, tetapi siapa atau bisa menjadi apa dirinya dan apa yang dilakukan atau dapat dilakukannya (Todaro dan Smith, 2011: 19).

UNDP mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator kemiskinan. BPS mendefinisikan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan (BPS Provinsi Jatim, 2018). Kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti data BPS mengenai tingkat kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia

Dalam konsep pembangunan manusia menurut UNDP, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 2018).

IPM memiliki kemampuan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dimensi dasar yang membentuk IPM meliputi: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Penghitungan IPM mengalami perubahan metodologi karena beberapa factor penyebab. Akibat terjadinya perubahan metodologi IPM, maka indikator dan metode penghitungan mengalami perubahan. Penghitungan IPM saat ini menggunakan rata-rata geometrik, sehingga dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari : Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah, dan Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan.

BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam empat golongan, yaitu : $IPM < 60$ (rendah), $60 - 70$ (sedang/menengah), $70-80$ (tinggi), dan ≥ 80 (sangat tinggi). IPM yang digunakan dalam penelitian ini adalah IPM yang diterbitkan oleh BPS.

Berdasarkan landasan teori dan kajian empiris, rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah “Diduga IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Jatim”.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh data sekunder variabel penelitian yang berhubungan dengan pengaruh IPM terhadap kemiskinan pdi Provinsi Jawa Timur. Data sekunder diperoleh dari BPS RI, BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappeda Provinsi Jawa Timur. Sampel tahun yang digunakan adalah dari tahun 2011 sampai tahun 2017. Teknik sampling menggunakan *non probability sampling*, dengan pertimbangan ketersediaan data dan pada tahun 2010 UNDP mengembangkan gagasan baru dalam perhitungan IPM. Jumlah sampel

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 kabupaten/kota x 7 tahun = 266 sampel data panel.

Metode analisis menggunakan analisis kuantitatif dengan data panel. Desain penelitian yang akan dilakukan menggunakan *explanatory study* atau *hypothesis testing study*. Sebagai variabel bebas (*independent*) adalah IPM adapun variabel terikat (*dependent*) adalah kemiskinan.

Sebelum melakukan estimasi, terlebih dahulu menentukan model regresi data panel yang terbaik menggunakan pendekatan metode *Pooled Ordinary Least Squared* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Berdasarkan hubungan kausal antar variabel yang diteliti, dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln(Y) = a + b \ln(X)$$

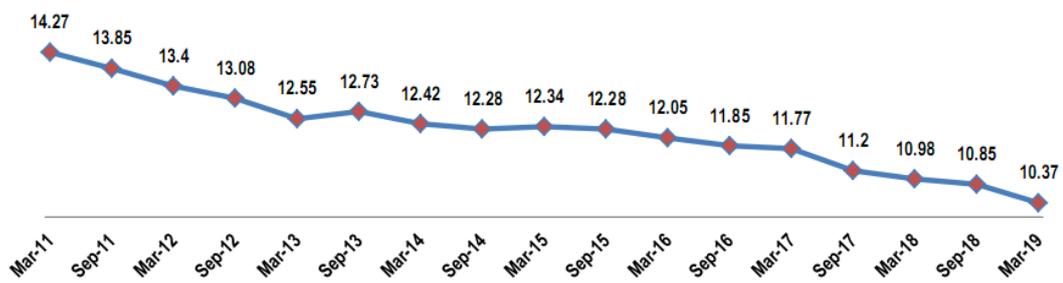
Uji ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai actual dapat diukur dari *goodness of fit*, seberapa baik sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya (Gujarati dan Porter, 2012: 94). Untuk melakukan uji *goodness of fit*, dilakukan pengukuran dengan menguji nilai statistik t dan koefisien determinasi (R^2) pada hasil regresi.

Setelah diperoleh model terbaik, maka langkah berikutnya melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dilakukan pada setiap uji regresi *ordinary least square* (OLS). Untuk regresi data panel, uji asumsi klasik meliputi uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kemiskinan di Jawa Timur

Berdasarkan Berita Resmi Statistik mengenai Profil Kemiskinan di Jawa Timur Maret 2019, Secara umum, pada periode September 2018 – Maret 2019 tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan, kecuali pada September 2013 dan Maret 2015. Peningkatan angka kemiskinan pada September 2013 dan Maret 2015, antara lain dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Perkembangan tingkat kemiskinan mulai Maret 2011 sampai dengan Maret 2019 ditunjukkan oleh Gambar 4.



Gambar 4. Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur, 2011-2019
(Sumber : BRS Profil Kemiskinan di Jawa Timur Maret 2019)

Berdasarkan grafik tersebut, perkembangan tingkat kemiskinan di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan. Selama periode September 2018 hingga Maret 2019, persentase penduduk miskin Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,48 poin persen, yaitu dari 10,85 persen pada September 2018 menjadi 10,37 persen pada Maret 2019. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain selama periode September 2018 hingga Maret 2019 terjadi inflasi umum sebesar 1,39 persen. Beberapa komoditi makanan mengalami perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu komoditi cabai merah mengalami penurunan 4,59 persen, penurunan indeks juga terjadi pada komoditi daging sapi (-0,31 persen), tempe (-1,69 persen), dan minyak goreng (-0,80

persen). Selain itu indeks upah buruh tanaman pangan mengalami kenaikan sebesar 3,54 persen, yaitu dari 148,76 pada September 2018 menjadi 154,02 pada Maret 2019.

Persoalan kemiskinan tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi yang tidak kalah penting adalah menyangkut seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman/ P1) dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (tingkat keparahan/ P2). Hal ini karena pemahaman kemiskinan secara holistik sangat dibutuhkan, agar dalam implementasi kebijakan yang diambil dapat terfokus dan efisien.

Tabel 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Jawa Timur Menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret 2018 – Maret 2019

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2018	1,167	2,800	1,945
September 2018	1,199	3,043	2,068
Maret 2019	1,147	2,549	1,799
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2018	0,280	0,732	0,495
September 2018	0,284	0,871	0,560
Maret 2019	0,283	0,646	0,452

Sumber : BRS Profil Kemiskinan di Jawa Timur Maret 2019

Pada Maret 2019 nilai P1 menunjukkan penurunan 0,27 poin atau sebesar 2,068. Penurunan nilai P1 tersebut terjadi di perkotaan (0,05 poin) dan di perdesaan (0,49 poin). Sementara itu, nilai P2 juga mengalami penurunan 0,11 poin atau menjadi 0,452 pada Maret 2019. Penurunan kedua nilai yaitu P1 dan P2 memberikan indikasi rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin kecil. Berdasarkan tabel tersebut juga diketahui bahwa kesenjangan kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan.

Untuk data tahun 2018, Kabupaten Malang menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, disusul oleh Kabupaten Jember, dan Kabupaten Sumenep. Banyaknya penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memiliki pekerjaan rumah untuk mengentaskan kemiskinan

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program yang bersinergi dengan potensi tiap wilayah.

Pembangunan Manusia

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian, apakah berada di kategori “rendah”, “sedang”, “tinggi” atau “sangat tinggi”. Pembangunan manusia di Jawa Timur secara kontinu mengalami kemajuan selama periode 2012-2018. Dari 66,74 (2012) meningkat menjadi 70,77 (2018) atau selama periode tersebut tumbuh 6,1 persen. Rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2012-2018 sebesar 0,98 persen per tahun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil.

Keberhasilan ini ditunjukkan pada tahun 2018 di seluruh wilayah

kabupaten/kota di Jawa Timur tidak ada yang berkategori “rendah”. Sebelumnya masih ada satu wilayah yaitu Sampang (Pulau Madura), pembangunan manusianya berkategori “rendah”. Pada tahun 2018, Sampang naik kelas dengan pembangunan manusia berkategori “sedang”. Walaupun demikian, Pemerintah Jawa Timur tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan manusia antar wilayah di Jawa Timur. Wilayah yang mempunyai IPM tergolong “sedang” diupayakan untuk mencapai kategori “tinggi”.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Data capaian masing-masing komponen akan menjadi input bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia wilayahnya masing-masing. Adapun data IPM Jawa Timur menurut komponen esensialnya sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 3 berikut.

Tabel 3. IPM Jawa Timur Menurut Komponen 2014-2018

Komponen	2014	2015	2016	2017	2018
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	70,45	70,68	70,74	70,80	70,97
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,45	12,66	12,98	13,09	13,10
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,05	7,14	7,23	7,34	7,39
Pengeluaran Per Kapita	10.012	10.383	10.715	10.973	11.380
IPM	68,14	68,95	69,74	70,27	70,77
Pertumbuhan IPM	0,88	1,19	1,15	0,75	0,72

Sumber : BRS IPM Jawa Timur 2018

Berdasarkan Tabel 3, meningkatnya pembangunan manusia di Jawa Timur setiap tahunnya dikarenakan adanya kenaikan masing-masing komponen pembentuknya (umur harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

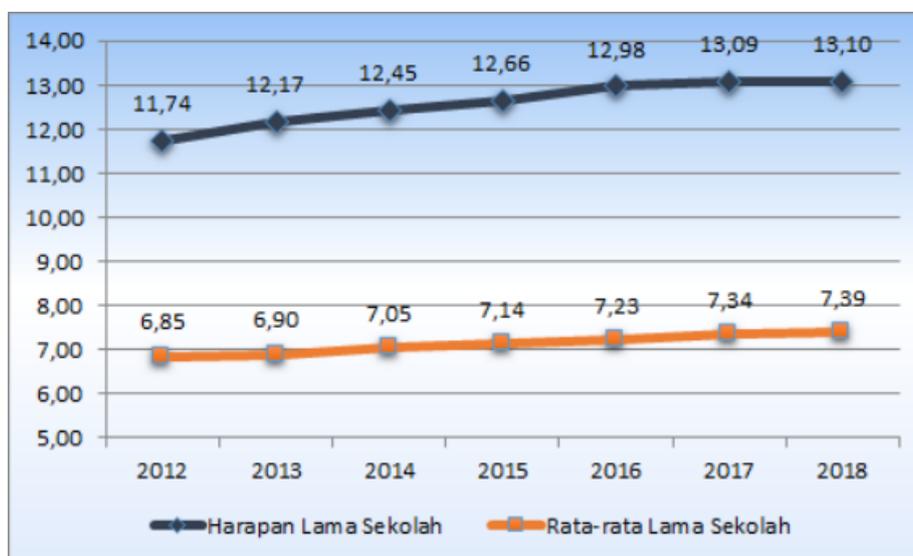
Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2014 hingga 2018, Jawa Timur telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 70,45 tahun (2014) menjadi 70,97 tahun (2018) atau naik sebesar 0,52 tahun. Dalam kurun waktu

2014-2018, secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,2 persen per tahun atau naik 0,14 tahun per tahunnya. Ini menunjukkan adanya perbaikan dimensi kesehatan di Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur semakin menikmati pembangunan di bidang kesehatan.

Angka HLS mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,85 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2018, harapan lama sekolah di Jawa Timur telah mencapai 13,10 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1. Pada periode yang sama, rata-

rata lama sekolah di Jawa Timur tumbuh 1,28 persen per tahun. Pertumbuhan yang positif pada dimensi pengetahuan ini merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Jawa Timur yang berarti kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

RLS Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 7,39 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Jawa Timur usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I).



Gambar 5. Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Jawa Timur 2012-2018
Sumber : BRS IPM Jawa Tinur Tahun 2019

Peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan menunjukkan bahwa

kemampuan ekonomi masyarakat Jawa Timur semakin membaik. Kondisi ini

sejalan dengan makro ekonomi yang ditunjukkan dari angka produk domestik regional bruto (output wilayah) yang juga mengalami kenaikan selama periode tersebut (BRS, 2019).

Demikian juga, harga-harga barang dan jasa khususnya kebutuhan pokok cukup terjaga inflasinya selama tahun 2018. Stabilitasnya inflasi tersebut menguatkan daya beli masyarakat Jawa Timur, sehingga memicu roda ekonomi berputar cukup dinamis.

Adapun data pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/ Kota menunjukkan bahwa IPM tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 81,74. Kota Surabaya bersama Kota Malang dan Kota Madiun merupakan daerah dengan IPM berkategori “sangat tinggi”. Daerah dengan kategori IPM “tinggi” sebanyak 17 kabupaten/kota, sedangkan yang berkategori “sedang” sebanyak 18 kabupaten/kota. Sampang yang semula mempunyai IPM berkategori “rendah”, mulai tahun 2018 berkategori “sedang” dengan IPM sebesar 61,00.

Sebagai Kota dengan IPM tertinggi, Surabaya mempunyai UHH terbaik sebesar 73,98 tahun. Sarana dan prasarana kesehatan di Surabaya relatif lengkap bahkan rumah sakit di Surabaya menjadi rujukan bagi pasien-pasien dari daerah yang lain. Selain itu masyarakatnya

dengan mudah memanfaatkan akses sarana dan prasarana kesehatan. Kesadaran masyarakat Surabaya untuk berpola hidup sehat cukup tinggi, sehingga mendukung meningkatnya usia harapan hidup. UHH terendah masih tercatat di Bondowoso atau sebesar 66,27 tahun. Walaupun demikian capaian UHH tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,23 tahun dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Bondowoso juga semakin membaik.

HLS tertinggi tercatat di Kota Malang yakni sebesar 15,40 tahun, dan terendah tercatat di Bangkalan sebesar 11,58 tahun. Adapun RLS tertinggi tercatat di Kota Madiun sebesar 11,11 tahun dan yang terendah masih dipegang Sampang dengan RLS sebesar 4,36 tahun. Untuk dimensi pengetahuan, dua kabupaten di Pulau Madura tercatat menjadi rangking terendah. Hal ini menunjukkan dalam hal pendidikan masih terdapat ketimpangan di Jawa Timur.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk data tahun 2018 tertinggi di Surabaya atau sebesar Rp. 17,16 juta, diikuti Kota Malang dan Kota Madiun masing-masing Rp. 16,16 juta dan Rp. 15,62 juta. Sementara, terendah tercatat di Bangkalan atau sebesar Rp. 8,39 juta. Data ini menegaskan sekali lagi,

kabupaten di Pulau Madura menempati ranking terendah, untuk dimensi standar hidup layak, menunjukkan adanya ketimpangan antara pembangunan di Jawa Timur daratan dengan Pulau Madura.

Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Timur

Analisis *Common Effect Model* (CEM) dalam rangka memilih model yang terbaik untuk regresi data panel, mendapatkan hasil model regresi sebagai berikut: $Y = 22,62 - 4,77X$. Adapun analisis *Fixed Effect Model* (FEM) mendapatkan hasil model regresi sebagai berikut: $Y = 13,33 - 2,58X$. Berdasarkan uji Chow, *p-value* dari *Cross-section Chi-square* $0,00 < 0,05$ sehingga keputusan yang diambil untuk sementara adalah memilih model regresi *Fixed Effect Model* (FEM).

Selanjutnya peneliti melakukan analisis *Random Effect Model* (REM), mendapatkan hasil model regresi REM sebagai berikut: $Y = 22,62 - 4,77X$. Berdasarkan uji Hausman, didapatkan *p-value* dari *Cross-section random* $0,00 < 0,05$, maka model terbaik yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM), yaitu : $Y = 13,33 - 2,58X$ dengan nilai t statistic adalah -13,35.

Nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,98, menunjukkan kemampuan variable bebas (IPM) dalam menjelaskan variable terikat (kemiskinan) sebesar 98 persen, adapun 1 persen lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Koefisien regresi X1 sebesar -2,58 secara spesifik menyatakan bahwa pada kondisi *ceteris paribus*, bila IPM naik 1 persen maka secara rata-rata kemiskinan akan turun sebesar 2,58 persen.

Setelah didapatkan model persamaan regresi terbaik, maka dilakukan uji asumsi klasik untuk regresi data panel, dengan hasil sebagai berikut: uji *Heteroskedastisitas* menggunakan uji *white*, menghasilkan *p-value obs R-square* $0,35 > 0,05$, sehingga uji *heteroskedastisitas* terpenuhi. Adapun uji *Multikolinearitas* menggunakan uji korelasi, menghasilkan korelasi yang rendah antar variable independen, yaitu sebesar 0,15, sehingga uji *multikolinearitas* terpenuhi.

Secara keseluruhan penelitian ini menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa pembangunan manusia dapat mempengaruhi angka kemiskinan, sebagaimana hasil penelitian Amalia, Nurpita dan Oktavia (2018), Nurmainah (2013), Kotambunan, Palar dan Tumilaar (2016), Susanti (2013) dan Suliswanto (2010) bahwa IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia terbukti berpengaruh signifikan dan negative terhadap kemiskinan. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan efektif untuk mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur.

Adapun saran rekomendasi untuk pemerintah provinsi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama dalam kebijakan maupun aplikasi program pemerintah. Ketimpangan dalam pembangunan manusia dapat dikurangi melalui peningkatan sinergi antar daerah berdasarkan potensi masing-masing dan fokus pada dimensi-dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia.
2. Pemerintah Provinsi dapat menekan angka kemiskinan melalui berbagai upaya peningkatan indeks pembangunan manusia, diantaranya dengan memperbanyak program pemberdayaan masyarakat sesuai potensi wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N., Nurpita, A., & Oktavia, r., 2018. Human Development Index, Unemployment and Poverty in Papua Province, 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* , 24-34.
- BPS, 2015. *Indeks Pembangunan Manusia 2014*. Jakarta: Badan Pusat statistik.
- BPS, 2018. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik .
- Gujarati, D., dan Porter, D., 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kotambunan, L., Palar, S. W., & Tumilaar, R. L., 2016. Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 16 No 01 Tahun 2016* , 925-933.
- Kuncoro, M., 2019. *Ekonomika Regional Teori dan Praktik*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Nurmainah, S., 2013. Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol 20 No 2, September 2013 , 131-141.
- Suliswanto, M. S., 2010. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 8 No 2 Tahun 2010* .
- Susanti, S., 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap

- Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif* Vol 9 No 1 April , 1-18.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C., 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang No 13 Tahun 2011. (n.d.). Retrieved July 13, 2019, from puslit.kemsos.go.id:
<https://puslit.kemsos.go.id/upload/aturan/files/f5c497935cc2794803aa5f91c3f2404e.pdf>
- UNDP, 2018. *Human Development Report* . Retrieved July 13, 2019, from <http://hdr.undp.org>:
<http://hdr.undp.org/en/2018-update>